



PKK dan Inovasi Edukasi Administrasi Kependudukan: Strategi Mewujudkan KISAK di Era Digital

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Temmy Hastian Universitas Panca Bhakti Pontianak temmy.hastian@upb.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Yenny Aman Serah Universitas Panca Bhakti Pontianak yenny.upb@gmail.com	
Rini Setiawati Universitas Panca Bhakti Pontianak rini090366@gmail.com	
Samuel Marpaung Universitas Panca Bhakti Pontianak marpaung.sm@upb.ac.id	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hastian, T., Serah, Y. A., Setiawati, R., & Marpaung, S. (2025). PKK dan Inovasi Edukasi Administrasi Kependudukan: Strategi Mewujudkan KISAK di Era Digital. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5121-5131.

Abstrak

Administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam pemenuhan hak-hak keluarga dan akses terhadap pelayanan publik. Namun, data administrasi kependudukan di Kabupaten Sanggau hingga Agustus 2025 menunjukkan bahwa capaian kepemilikan dokumen kependudukan belum merata, khususnya pada Kartu Identitas Anak (KIA), akta perkawinan, dan akta perceraian. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih dekat dengan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mengembangkan inovasi edukasi administrasi kependudukan sebagai strategi pendukung pelaksanaan Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) di era digital di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK berperan sebagai agen edukasi nonformal yang memanfaatkan pendekatan persuasif dan media digital sederhana dalam menyampaikan informasi administrasi kependudukan kepada keluarga. Namun, efektivitas inovasi edukasi digital tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital, akses teknologi, dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran PKK dalam inovasi edukasi administrasi kependudukan memiliki potensi strategis dalam mendukung KISAK di tingkat lokal, meskipun masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek sosial dan kelembagaan.

Kata kunci: PKK, Administrasi Kependudukan, KISAK, Inovasi Edukasi Digital, Kabupaten Sanggau

Abstract

Population administration is an important foundation for fulfilling family rights and access to public services. However, population administration data in Sanggau Regency until August 2025 shows that the achievement of population document ownership is still uneven, particularly for Child Identity Cards (KIA), marriage certificates, and divorce certificates. This condition indicates the need for an educational approach that is closer to families. This study aims to analyse the role of Family Empowerment and Welfare (PKK) in developing innovations in population administration education as a strategy to support the implementation of the Indonesian Family Awareness of Population Administration (KISAK) in the digital era in Sanggau Regency. This study uses an empirical method with a sociological-legal approach through interviews, observations, and documentation studies. The results show that PKK acts as a non-formal educational agent that utilises a persuasive approach and simple digital media in conveying population administration information to families. However, the effectiveness of these digital educational innovations is still influenced by limitations in digital literacy, access to technology, and cross-sector coordination. This study concludes that the role of PKK in population administration education innovation has strategic potential in supporting KISAK at the local level, although it still requires strengthening from various social and institutional aspects.

Keywords: PKK, Population Administration, KISAK, Digital Education Innovation, Sanggau Regency

A. Pendahuluan

Administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk (Mochammad Doddy Syahirul Alam, 2021). Dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas administratif, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi warga negara untuk memperoleh berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penegakan hukum. Dalam perspektif konstitusional, pemenuhan administrasi kependudukan berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban penduduk sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya hak atas pengakuan hukum dan kepastian status kewarganegaraan. (Zudan Arif Fakrulloh; Endar Wismulyani, 2018). Dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai instrumen yuridis yang menentukan status hukum seseorang dalam kehidupan sosial dan bernegara. Tanpa kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan sah, individu dan keluarga berpotensi mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, jaminan sosial, serta perlindungan hukum dari negara (Philippus M. Hadjon, 1987).

Negara Indonesia secara normatif telah menegaskan pentingnya tertib administrasi kependudukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Regulasi ini menempatkan administrasi kependudukan sebagai tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Putra, 2014). Namun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan administrasi kependudukan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tingkat keluarga sebagai unit sosial terkecil. Tantangan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis pelayanan, tetapi juga berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran hukum dan literasi administrasi kependudukan di kalangan masyarakat (Syafitri & Mardatillah, 2025).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa tertib administrasi kependudukan belum sepenuhnya terwujud di tingkat masyarakat, terutama pada pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Fakrulloh dan Wismulyani menegaskan bahwa rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan sering kali disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai fungsi strategis administrasi kependudukan, prosedur pelayanan yang dianggap rumit, serta jarak akses layanan yang belum merata (Zudan Arif Fakrulloh, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan administrasi kependudukan tidak

semata-mata bersifat administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan dimensi kesadaran hukum dan literasi sosial masyarakat.

Dalam konteks tersebut, upaya mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan reformasi pelayanan birokrasi, tetapi juga penguatan edukasi publik yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.(Cathrin Zanta Febronia Da Silva, 2024) Edukasi administrasi kependudukan menjadi penting sebagai sarana membangun pemahaman bahwa pencatatan kependudukan merupakan kewajiban hukum sekaligus hak konstitusional penduduk(Zudan Arif Fakrulloh; Endar Wismulyani, 2023) Pendekatan edukatif ini semakin relevan di era digital(Andarasni Parwitasari & Budyatmojo, 2022) ketika teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, namun belum seluruh lapisan masyarakat mampu memanfaatkannya secara optimal dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.

Di sinilah peran organisasi kemasyarakatan dalam membangun komunikasi pentingnya administrasi kependudukan(Cathrin Zanta Febronia Da Silva, 2024), termasuk dalam penelitian ini mengupas khususnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi strategis. PKK memiliki kedekatan struktural dan kultural dengan keluarga sebagai unit sosial terkecil,(Yenny Aman Serah; Resmaya gnesia Mutiara Sirait; Jjesajas et al., 2025) sehingga berpotensi berperan sebagai agen edukasi nonformal dalam membangun kesadaran administrasi kependudukan. Melalui jejaring kader hingga tingkat desa dan dasa wisma, PKK mampu menjangkau keluarga secara langsung, dengan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual. Peran ini sejalan dengan gagasan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara berkelanjutan(Farma Rahayu, Mella Ismelina, Nenu Ruhaeni, Arinto Nurcahyo, 2010)

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya menempatkan PKK sebagai mitra pemerintah dalam program kesejahteraan keluarga, kesehatan, dan pendidikan sosial dasar(Muhyiddin Robani & Ekawaty, 2019; Rizky Indarwati, 2017) Namun, kajian yang secara spesifik mengkaji PKK sebagai agen inovasi edukasi administrasi kependudukan, terutama dengan memanfaatkan media digital di tingkat daerah, masih relatif terbatas. Padahal, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan telah dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi data, dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat(Zudan Arif Fakrulloh; Endar Wismulyani, 2023) Kesenjangan antara ketersediaan sistem digital dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya menjadi ruang problematik yang perlu dijawab melalui pendekatan edukasi sosial berbasis komunitas.

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada peran PKK dalam mengembangkan inovasi edukasi administrasi kependudukan sebagai strategi mewujudkan Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) di Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data empiris, capaian pemenuhan administrasi kependudukan—khususnya pencatatan Kartu Identitas Anak (KIA) serta peristiwa perkawinan, perceraian, dan kematian—masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan nyata dalam pembangunan kesadaran administrasi kependudukan di tingkat keluarga.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan pada pertanyaan: bagaimana peran PKK dalam mengembangkan inovasi edukasi administrasi kependudukan sebagai strategi mewujudkan KISAK di era digital di Kabupaten Sanggau? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris peran PKK dalam edukasi administrasi kependudukan, mengidentifikasi bentuk inovasi edukasi digital yang dikembangkan, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di tingkat keluarga.

Novelty penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif kesadaran hukum, edukasi nonformal, dan pemanfaatan teknologi digital dalam membaca peran PKK sebagai agen edukasi administrasi kependudukan di tingkat lokal. Dengan menempatkan PKK sebagai aktor sosial yang aktif dalam inovasi edukasi digital, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian administrasi kependudukan sekaligus memberikan pemahaman empiris mengenai peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung tertib administrasi kependudukan secara kontekstual dan humanis.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat.(Qamar et al., 2017) Pendekatan ini

dipilih karena permasalahan administrasi kependudukan dan peran PKK dalam mewujudkan KISAK tidak dapat dipahami secara normatif semata, melainkan harus dianalisis dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan di tingkat keluarga dan komunitas.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Sanggau, dengan pertimbangan rendahnya capaian pemenuhan administrasi kependudukan serta keterlibatan aktif PKK dalam program KISAK. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan kader PKK, aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta keluarga sasaran program. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, hasil Rakernas PKK Tahun 2025, serta laporan kegiatan PKK.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori kesadaran hukum, edukasi nonformal, dan peran organisasi kemasyarakatan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Empiris Perkembangan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sanggau

Administrasi kependudukan merupakan wajah nyata kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari warga, karena melalui dokumen kependudukanlah identitas hukum, status keluarga, dan peristiwa penting kehidupan seseorang diakui secara resmi (M.I.S, 2021; Nur et al., 2024). Di Kabupaten Sanggau, perkembangan administrasi kependudukan hingga Agustus 2025 menunjukkan dinamika yang relatif beragam, di mana capaian pada beberapa jenis dokumen telah mendekati target nasional, sementara jenis dokumen lainnya masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhannya.

Berdasarkan laporan resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, progres perekaman KTP-el bagi penduduk wajib KTP hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai rata-rata 91,25 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum layanan perekaman identitas dasar penduduk dewasa telah berjalan cukup optimal di hampir seluruh kecamatan, dengan persentase tertinggi tercatat di Kecamatan Kapuas dan Parindu, serta capaian terendah di Kecamatan Balai. Meski demikian, masih terdapat lebih dari 32 ribu penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman, yang sebagian besar berada di wilayah dengan tantangan geografis dan mobilitas penduduk yang tinggi.

Hal tersebut dapat dilihat pada Data Perkembangan Adminduk Kabupaten Sanggau, pada tabel berikut :

Tabel 1
Laporan Pelaksanaan Perekaman dan Wajib KTP El
Kabupaten Sanggau per-31 Agustus 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	WKTP DKB SI Tahun 2025	WKTP Dinamis (PDAK)	Progres Rekam	Progres Belum Rekam	Progres Persentase
1	Kec. Kapuas	87.291	64.795	64.670	60.733	3.937	93,91
2	Kec. Mukok	22.061	16.370	16.345	15.199	1.146	92,99
3	Kec. Noyan	11.813	8.832	8.819	7.827	992	88,75
4	Kec. Jangkang	29.879	22.741	22.684	20.295	2.389	89,47
5	Kec. Bonti	23.976	17.751	17.743	16.421	1.322	92,55
6	Kec. Beduai	13.344	9.889	9.881	8.866	1.015	89,73
7	Kec. Sekayam	42.515	31.008	30.961	28.162	2.799	90,96
8	Kec. Kembayan	33.296	24.616	24.569	22.389	2.180	91,13
9	Kec. Parindu	40.145	29.731	29.676	27.800	1.876	93,68
10	Kec. Tayan Hulu	40.117	29.433	29.423	26.333	3.090	89,50
11	Kec. Tayan Hilir	39.121	28.641	28.610	26.183	2.427	91,52
12	Kec. Balai	28.751	21.820	21.774	18.849	2.925	86,57
13	Kec. Toba	17.478	12.818	12.821	11.515	1.306	89,81
14	Kec. Meliau	51.969	38.581	38.482	34.832	3.650	90,52

15	Kec. Entikong	18.945	13.911	13.883	12.546	1.337	90,37
Jumlah		500.701	370.937	370.341	337.95	32.391	91,25
					0		

Sumber Data : DKB Semester II 2024 dan PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Diolah

Selanjutnya dapat dilihat data dan informasi terkait kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sanggau per Agustus 2025, pada tabel berikut :

Tabel II
Laporan Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Kabupaten Sanggau, per Agustus 2025

No	Kecamatan	Wajib KIA	Belum Memiliki	Memiliki	Progres Persentase
1	Kec. Kapuas	22.645	9.093	13.552	59,85
2	Kec. Mukok	5.737	2.775	2.962	51,63
3	Kec. Noyan	2.990	1.511	1.479	49,46
4	Kec. Jangkang	7.173	3.574	3.599	50,17
5	Kec. Bonti	6.262	2.863	3.399	54,28
6	Kec. Beduai	3.483	2.098	1.385	39,76
7	Kec. Sekayam	11.548	5.684	5.864	50,78
8	Kec. Kembayan	8.711	3.586	5.125	58,83
9	Kec. Parindu	10.485	4.820	5.665	54,03
10	Kec. Tayan Hulu	10.755	5.773	4.982	46,32
11	Kec. Tayan Hilir	10.519	6.654	3.865	36,74
12	Kec. Balai	6.935	4.729	2.206	31,81
13	Kec. Toba	4.681	2.563	2.118	45,25
14	Kec. Meliau	13.433	8.647	4.786	35,63
15	Kec. Entikong	5.060	2.492	2.568	50,75
Jumlah		130.417	66.862	63.555	48,73

Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Diolah

Berbeda dengan capaian perekaman KTP-el, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan kondisi yang jauh lebih rendah. Hingga Agustus 2025, tingkat kepemilikan KIA di Kabupaten Sanggau baru mencapai 48,73 persen dari total anak wajib KIA. Bahkan di beberapa kecamatan seperti Balai, Beduai, Meliau, dan Tayan Hilir, kepemilikan KIA masih berada di bawah 40 persen. Data ini mengindikasikan bahwa kesadaran keluarga terhadap pentingnya identitas hukum anak belum terbentuk secara merata, serta masih kuatnya anggapan bahwa dokumen kependudukan anak belum menjadi kebutuhan mendesak dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

Selanjutnya juga dapat dilihat pada aspek pencatatan peristiwa kependudukan yaotu peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian pada gambar berikut :



Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Diolah

Pada aspek pencatatan peristiwa penting, perkembangan administrasi kependudukan juga memperlihatkan pola yang serupa. Kepemilikan akta kelahiran relatif tinggi dengan capaian rata-rata 92,59 persen, yang menunjukkan bahwa pencatatan kelahiran telah menjadi praktik yang cukup mapan di masyarakat. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya sejalan dengan pencatatan peristiwa hukum lainnya. Kepemilikan akta perkawinan baru mencapai 53,27 persen, sementara kepemilikan akta perceraian berada pada angka yang lebih rendah, yakni 39,73 persen. Rendahnya pencatatan perkawinan dan perceraian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat dengan kesadaran untuk melakukan pencatatan hukum secara resmi. Selain itu, pencatatan akta kematian hingga Agustus 2025 mencatat total 2.052 peristiwa kematian yang telah didaftarkan. Meskipun jumlah ini menunjukkan adanya proses pencatatan yang berjalan, fluktuasi antar kecamatan dan bulan mengindikasikan bahwa pelaporan kematian masih sangat bergantung pada inisiatif keluarga dan perangkat lokal. Kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, persepsi manfaat, serta keterbatasan pemahaman mengenai implikasi hukum dan administratif dari tidak dicatatkannya peristiwa kematian secara resmi.

Secara keseluruhan, gambaran empiris perkembangan administrasi kependudukan di Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa tantangan utama tidak lagi terletak semata-mata pada ketersediaan layanan, melainkan pada aspek kesadaran, literasi hukum, dan pemahaman keluarga terhadap pentingnya administrasi kependudukan sebagai bagian dari perlindungan hak dan kepastian hukum. Kesenjangan antara capaian KTP-el dan akta kelahiran yang relatif tinggi dengan kepemilikan KIA, akta perkawinan, dan akta perceraian yang masih rendah memperlihatkan adanya ruang strategis bagi pendekatan edukatif yang lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan. (Menci Septianindy Sadipun et al., 2024). Zudan dkk. menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan subsistem administrasi negara yang menuntut keteraturan sistemik dan dukungan teknologi informasi untuk menjamin kecepatan serta ketepatan layanan. (Zudan Arif Fakrulloh; Endar Wismulyani, 2024) Dengan demikian, capaian rendah di Kabupaten Sanggau dapat dianalisis sebagai indikasi belum optimalnya ekosistem adminduk, bukan sekadar kegagalan individu warga.

Dalam konteks inilah, peran organisasi kemasyarakatan seperti PKK menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut. PKK memiliki kedekatan struktural dan emosional dengan keluarga, sehingga berpotensi menjadi agen edukasi administrasi kependudukan yang mampu menjembatani kebijakan negara dengan realitas sosial masyarakat (Lilik Aslichati, 2011) di Kabupaten Sanggau. Gambaran empiris ini sekaligus menjadi dasar analitis untuk memahami urgensi inovasi edukasi administrasi kependudukan sebagai strategi mewujudkan Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) di era digital.

2. Peran PKK dalam Inovasi Edukasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sanggau

Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Sanggau tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki kedekatan struktural dan emosional dengan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Dalam konteks rendahnya capaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan—khususnya Kartu Identitas Anak (48,73%), akta perkawinan (53,27%), dan akta perceraian (39,73%)—PKK hadir sebagai aktor strategis yang menjembatani kebijakan negara dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Peran ini menjadi semakin relevan ketika KISAK ditetapkan sebagai program prioritas PKK, yang menuntut adanya pendekatan edukasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga persuasif dan kontekstual. Zudan dkk. menekankan bahwa keberhasilan SIAK tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur teknologi, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan manfaat administrasi kependudukan. (Zudan Arif Fakrulloh; Endar Wismulyani, 2024) Dalam konteks ini, PKK di Kabupaten Sanggau berperan strategis sebagai agen edukasi nonformal yang mentransformasikan sistem teknokratis menjadi pengetahuan yang dapat dipahami di tingkat keluarga.

Inovasi edukasi administrasi kependudukan yang dilakukan oleh PKK di Kabupaten Sanggau berkembang melalui pemanfaatan berbagai media dan ruang sosial yang telah melekat dalam aktivitas keseharian masyarakat. Edukasi tidak lagi disampaikan secara formal dan satu arah, melainkan terintegrasi dalam kegiatan rutin PKK, seperti pertemuan dasawisma, arisan, posyandu, pembinaan keluarga, dan kegiatan keagamaan. Melalui forum-forum tersebut, kader PKK menyampaikan informasi mengenai pentingnya pencatatan peristiwa kependudukan—mulai dari kepemilikan KTP-el, Kartu Keluarga, KIA, hingga akta perkawinan, perceraian, dan kematian—dengan bahasa sederhana dan pendekatan dialogis yang mudah dipahami oleh keluarga.

Di era digital, PKK di Kabupaten Sanggau juga mulai mengembangkan inovasi edukasi berbasis media digital, meskipun masih bersifat bertahap dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. Pemanfaatan grup WhatsApp PKK, media sosial lokal, serta penyebaran materi visual sederhana menjadi sarana baru dalam menyampaikan informasi administrasi kependudukan. Inovasi ini penting, mengingat data menunjukkan bahwa meskipun capaian perekaman KTP-el telah mencapai 91,25 persen, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan peristiwa kependudukan lanjutan masih belum merata. Dengan demikian, inovasi edukasi digital oleh PKK berfungsi sebagai pelengkap pendekatan tatap muka, bukan sebagai pengganti, sehingga tetap mempertimbangkan kesenjangan literasi digital di masyarakat. (Herry Fitriyadi, 2015)

Secara substantif, peran PKK dalam inovasi edukasi administrasi kependudukan tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka kepemilikan dokumen, tetapi juga pada pembentukan kesadaran keluarga mengenai makna hukum dan sosial dari dokumen tersebut. Dalam praktiknya, kader PKK sering kali berperan sebagai pendamping yang membantu keluarga memahami prosedur, persyaratan, serta konsekuensi hukum apabila peristiwa kependudukan tidak dicatatkan. Pendampingan ini bersifat humanis karena dilakukan melalui relasi sosial yang setara, bukan dalam relasi birokratis yang kaku. Hal ini menjadi penting di Kabupaten Sanggau, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang beragam, sehingga membutuhkan pendekatan edukasi yang sensitif terhadap konteks lokal.

Namun demikian, efektivitas peran PKK dalam mengembangkan inovasi edukasi administrasi kependudukan masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Pertama, kapasitas kader PKK dalam penguasaan materi administrasi kependudukan dan pemanfaatan media digital masih belum merata. Kedua, koordinasi antara PKK dan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam bentuk program edukasi bersama yang berkelanjutan. Ketiga, kesenjangan akses teknologi dan literasi digital di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau turut membatasi jangkauan inovasi edukasi berbasis digital.

Meskipun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa kehadiran PKK sebagai agen edukasi memberikan kontribusi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. PKK berfungsi sebagai “ruang antara” (*bridging institution*) yang menghubungkan negara dan keluarga, sehingga pesan-pesan kebijakan tidak dipersepsikan sebagai beban administratif semata, melainkan sebagai bagian dari upaya melindungi hak dan identitas keluarga. Dalam konteks inilah, inovasi edukasi administrasi kependudukan oleh PKK di Kabupaten Sanggau dapat dipahami sebagai proses sosial yang

berkelanjutan, yang menempatkan keluarga sebagai subjek, bukan objek, dalam mewujudkan Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan

3. Faktor Pendukung dan Kendala Inovasi Edukasi Digital oleh PKK

Pelaksanaan inovasi edukasi administrasi kependudukan berbasis digital oleh PKK di Kabupaten Sanggau tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, sosial, dan kultural. Inovasi digital yang dijalankan PKK—baik melalui pemanfaatan media sosial, grup komunikasi berbasis aplikasi pesan instan, maupun penyampaian informasi administrasi kependudukan secara daring—menunjukkan adanya dinamika antara peluang dan keterbatasan yang saling berkelindan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor pendukung dan kendala menjadi penting untuk memahami sejauh mana peran PKK sebagai agen edukasi digital dapat dijalankan secara efektif.

a. Faktor Pendukung Inovasi Edukasi Digital oleh PKK

Salah satu faktor pendukung utama dalam pengembangan inovasi edukasi digital oleh PKK di Kabupaten Sanggau adalah kekuatan jejaring sosial PKK yang telah terbangun secara struktural dan kultural hingga tingkat desa dan dusun. PKK memiliki kedekatan relasional dengan keluarga sasaran, (Handayani, n.d.) sehingga pesan-pesan edukasi administrasi kependudukan yang disampaikan melalui media digital cenderung lebih mudah diterima. Kedekatan emosional ini menjadikan kader PKK bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga figur yang dipercaya dalam kehidupan sosial masyarakat.

Faktor pendukung lainnya adalah komitmen kelembagaan PKK terhadap program KISAK, yang telah ditetapkan sebagai program prioritas hasil Rapat Kerja Nasional PKK Tahun 2025. (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2025) Penetapan ini memberikan legitimasi normatif bagi kader PKK untuk secara aktif terlibat dalam edukasi administrasi kependudukan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam praktiknya, legitimasi tersebut memperkuat posisi PKK sebagai aktor non-negara yang berperan langsung dalam mendukung kebijakan administrasi kependudukan di tingkat daerah.

Selain itu, meningkatnya penetrasi teknologi digital di kalangan masyarakat, khususnya penggunaan telepon pintar dan aplikasi media sosial, turut menjadi faktor pendukung inovasi edukasi digital. Media digital memungkinkan PKK menyampaikan informasi administrasi kependudukan secara lebih cepat, fleksibel, dan berkelanjutan dibandingkan metode konvensional. (Yenny Aman Serah; Purwanti; Febrianawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait; Agustinus Astono, 2025) Informasi mengenai pentingnya KIA, pencatatan perkawinan, perceraian, dan kematian dapat disebarluaskan secara berulang melalui konten sederhana yang mudah dipahami oleh keluarga.

Dukungan informal dari pemerintah daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menjadi faktor pendukung, terutama dalam bentuk penyediaan data, materi sosialisasi, serta koordinasi kegiatan edukasi. Sinergi ini, meskipun belum sepenuhnya terlembaga secara formal, memberikan ruang bagi PKK untuk menyesuaikan pesan edukasi dengan kebutuhan riil masyarakat di Kabupaten Sanggau.

b. Kendala dalam Pelaksanaan Inovasi Edukasi Digital oleh PKK

Di sisi lain, inovasi edukasi digital oleh PKK juga menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan kultural. Kendala utama yang muncul adalah kesenjangan literasi digital, baik di kalangan kader PKK maupun masyarakat sasaran. Tidak semua kader memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola konten digital, sementara sebagian keluarga masih memandang teknologi digital sebagai sesuatu yang rumit atau tidak relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membatasi jangkauan dan efektivitas pesan edukasi administrasi kependudukan yang disampaikan secara daring.

Kendala berikutnya adalah ketimpangan akses terhadap infrastruktur teknologi, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan Kabupaten Sanggau. Keterbatasan jaringan internet dan perangkat pendukung menyebabkan inovasi edukasi digital belum dapat menjangkau seluruh keluarga secara merata. Akibatnya, pendekatan digital sering kali harus dikombinasikan dengan metode tatap muka, yang menuntut tambahan waktu dan tenaga dari kader PKK.

Selain itu, belum optimalnya koordinasi lintas sektor menjadi kendala tersendiri. Peran PKK dalam edukasi administrasi kependudukan masih sangat bergantung pada inisiatif lokal dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan kebijakan daerah. Ketiadaan pedoman teknis yang baku terkait edukasi administrasi kependudukan berbasis digital menyebabkan pelaksanaan inovasi berjalan secara variatif dan belum terstandarisasi.

Dari sisi sosial budaya, masih terdapat persepsi masyarakat yang menempatkan administrasi kependudukan sebagai urusan sekunder, khususnya terkait pencatatan peristiwa penting seperti perceraian dan kematian. Persepsi ini mempengaruhi respons masyarakat terhadap pesan edukasi digital yang disampaikan PKK, sehingga inovasi edukasi belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir dan kebiasaan administrasi kependudukan keluarga secara signifikan.

c. Analisis Kritis terhadap Dinamika Faktor Pendukung dan Kendala

Secara analitis, faktor pendukung dan kendala inovasi edukasi digital oleh PKK di Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sosial dan kelembagaan. Inovasi digital yang dijalankan PKK lebih tepat dipahami sebagai proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara bertahap, bukan sebagai solusi instan terhadap rendahnya capaian administrasi kependudukan.

Kedekatan sosial PKK dengan keluarga menjadi modal utama yang memungkinkan inovasi edukasi digital dijalankan secara humanis. (Yenny Aman Serah; Resmaya gnesia Mutiara Sirait; Jjesajas et al., 2025) Namun, modal sosial tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas kader, penguatan koordinasi lintas sektor, dan dukungan kebijakan yang lebih sistematis. Tanpa penguatan tersebut, inovasi edukasi digital berpotensi berhenti pada tahap penyampaian informasi, tanpa menghasilkan perubahan perilaku administrasi kependudukan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan faktor pendukung dan kendala ini menegaskan bahwa peran PKK dalam inovasi edukasi administrasi kependudukan di Kabupaten Sanggau merupakan proses yang dinamis dan kontekstual. Inovasi digital yang dijalankan PKK telah membuka ruang baru bagi pendekatan edukasi berbasis keluarga, namun masih memerlukan penguatan struktural dan kultural agar mampu menjawab tantangan rendahnya kesadaran administrasi kependudukan secara lebih efektif.

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian empiris mengenai perkembangan administrasi kependudukan di Kabupaten Sanggau serta analisis terhadap peran PKK dalam inovasi edukasi administrasi kependudukan di era digital, dapat disintesis bahwa persoalan tertib administrasi kependudukan tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan layanan atau regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, tingkat literasi, dan pola komunikasi di tingkat keluarga. Data perkembangan administrasi kependudukan per Agustus 2025 menunjukkan capaian yang beragam antarjenis dokumen, di mana kepemilikan akta kelahiran dan perekaman KTP-el relatif tinggi, sementara kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), akta perkawinan, dan akta perceraian masih berada pada kisaran menengah hingga rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan tingkat kesadaran dan prioritas masyarakat terhadap masing-masing dokumen kependudukan.

Dalam konteks tersebut, kehadiran PKK sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis keluarga memperlihatkan potensi peran yang signifikan dalam menjembatani kebijakan administrasi kependudukan dengan realitas kehidupan masyarakat. PKK tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen edukasi nonformal yang mengedepankan pendekatan persuasif, kedekatan sosial, dan relasi emosional dengan keluarga. Inovasi edukasi administrasi kependudukan yang dilakukan oleh PKK—baik melalui pertemuan rutin, pendampingan kader, maupun pemanfaatan media digital sederhana—menunjukkan adanya upaya adaptif dalam merespons tantangan era digital, meskipun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara sistematis.

Namun demikian, efektivitas inovasi edukasi digital oleh PKK masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan kendala. Di satu sisi, kekuatan jaringan PKK hingga tingkat desa, legitimasi sosial kader, serta dukungan programatik KISAK sebagai program prioritas organisasi menjadi modal penting dalam pelaksanaan edukasi administrasi kependudukan. Di sisi lain, keterbatasan literasi digital masyarakat, variasi kapasitas kader, keterbatasan sarana pendukung, serta belum optimalnya integrasi lintas sektor menjadi tantangan yang membatasi jangkauan dan keberlanjutan inovasi edukasi tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi edukasi administrasi kependudukan berbasis digital tidak dapat dipahami secara teknis semata, tetapi perlu dilihat sebagai proses sosial yang berlapis dan kontekstual.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa peran PKK dalam inovasi edukasi administrasi kependudukan di Kabupaten Sanggau berada pada tahap berkembang,

dengan karakteristik yang masih sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal, sumber daya, dan pola interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran PKK dalam konteks ini perlu ditempatkan secara proporsional, sebagai bagian dari upaya kolektif membangun kesadaran administrasi kependudukan di tingkat keluarga, bukan sebagai satu-satunya faktor penentu capaian administrasi kependudukan daerah

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PKK di Kabupaten Sanggau memiliki peran penting sebagai agen edukasi administrasi kependudukan dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) di era digital. Peran tersebut tercermin melalui kegiatan edukasi nonformal yang memanfaatkan kedekatan sosial PKK dengan keluarga, serta melalui upaya inovatif dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana penyampaian informasi administrasi kependudukan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi edukasi administrasi kependudukan oleh PKK berkontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan, meskipun belum dapat diukur secara langsung terhadap perubahan tingkat kepemilikan dokumen secara menyeluruh. Efektivitas peran PKK dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, seperti struktur organisasi PKK yang menjangkau hingga tingkat desa dan kepercayaan masyarakat terhadap kader PKK. Di sisi lain, keterbatasan literasi digital, variasi akses teknologi, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor menjadi kendala yang mempengaruhi keberlanjutan inovasi edukasi digital.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran PKK dalam inovasi edukasi administrasi kependudukan di Kabupaten Sanggau bersifat potensial dan kontekstual. Temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi kondisi di seluruh daerah, melainkan memberikan gambaran empiris mengenai dinamika peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung tertib administrasi kependudukan di tingkat lokal

E. Referensi

- Ardhia Regita, M. I. S., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2021). IMPLEMENTASI PENDAFTARAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SISTEM ONLINE SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK. *Semarang Law Review*, 2(2), 203–215.
- Aslichati, L. (2011). Organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan. *Jurnal organisasi dan manajemen*, 7(1), 1-7.
- Da Silva, W. C. Z. F., Mustafa, I., Sedu, V. A., & Kedoh, L. N. (2024). Komunikasi dalam Inovasi “Jalan MANTAN” Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Rangka Pemenuhan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 2106-2113.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, K. dan T. P. P. (2025). *Buku II_Strategi Geraka PKK: Hasil Rakernas X PKK Tahun 2025*.
- Dwimahendrawan, A., & Rohim, R. (2024). Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Smart Village. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 5766-5774.
- Fakrulloh, Z. A., & SH, M. (2025). *NYARIS SEWINDU: Pembaruan dan Transformasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Fakrulloh, Z. A., & Wismulyani, E. (2023). *Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan*. PT. Cempaka Putih.
- Fakrulloh, Z. A., & Wismulyani, E. (2024). *Teknologi Informasi dalam Administrasi Kependudukan*. PT.Cempaka Putih.
- Fitriyadi, H. (2013). Integrasi teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan: potensi manfaat, masyarakat berbasis pengetahuan, pendidikan nilai, strategi implementasi dan pengembangan profesional. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan UNY*, 21(3), 163709. <https://doi.org/10.21831/jptk.v21i3.3255>
- Handayani, T., Parimarta, I., Sukesu, K., & Ardika, I. W. (2008). Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kota Malang: dalam perspektif kajian budaya. *E-Journal of Cultural Studies*, 2(1), 1-14.

- Indarwati, R. (2017). Strategi pelaksanaan tim pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di kecamatan Samarinda Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 861-872.
- Parwitasari, T. A., Supanto, S., Ismunarno, I., Budyatmojo, W., & Sulistyanta, S. (2022). Kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan media sosial. *Gema Keadilan*, 9(1), 57-69.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahayu, M. I. F., Ruhaeni, N., & Nurcahyo, A. (2010). Pemberdayaan hukum dan konstruksi model pemberdayaan komunikatif responsif. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 26(1), 31-41.
- Robani, M. M., & Ekawaty, M. (2019). Analisis dampak pemberdayaan perempuan terhadap kesejahteraan keluarga. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 1-18.
- Sadipun, M. M. S., Mustafa, I., Sedu, V. A., & Kedoh, L. N. (2024). Peran Komunikasi Interpersonal dalam Mendukung Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 2114-2120. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Serah, Y. A., Sirait, R. A. M., Jesajas, T. G. J., Nugraha, A., & Marpaung, S. (2025). Partisipasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Melalui Media Edukasi Digital untuk Mencegah Perkawinan Anak. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 13(2), 91-106.
- Syafitri, I., & Mardatillah, A. (2025). Efficiency of Population Administration Services Based on Digital Identity: An Integrative Analysis From the Perspective of Islamic Values in Riau Province. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 16(1), 101-120. <https://doi.org/10.23960/administratio.v16i1.487>
- SyahirulAlam, M. D. (2013). Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 1-14.